



# Masyarakat Lokal dalam Konfigurasi Kapitalisme Negara di Sektor Pariwisata

Dwi Setiawan Chaniago<sup>1\*</sup>, Heru Nugroho<sup>2</sup>,  
M. Falikul Isbah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

<sup>2&3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

\*Email: [dwisetiawan2019@gmail.com](mailto:dwisetiawan2019@gmail.com)

**Abstrak:** *Local communities face a situation of state capitalism infiltration along with the development of the Mandalika Special Economic Zone in Central Lombok. The regional infrastructure development process carried out by Development and Management Business Entities with the support of State-Owned Enterprises raises questions to what extent the development process carried out has implications for the lives of local communities. This research aims to determine the implications of the state capitalism approach in developing the Mandalika special economic zone for local communities as seen from the implementation of the MotoGP event. This research is a case study research with a qualitative approach. This research shows that there is an imbalance in the role of state statist intervention in the distribution of benefits from economic regulatory activities by BUMN which is more business-oriented rather than social development that favors local communities. This is because infrastructure development strategies and event implementation in the region operate in the realm of political goals rather than achieving economic goals at the local level. Support for state statist through political events is aimed at stimulating the activities of business actors in the region and attracting investor interest. The configuration of state capitalist actors in the operations of the Mandalika SEZ shows the characteristics of state capitalism which is characterized by economic inclusive nationalism which combines state statist intervention through strengthening the role of BUMN while also opening up opportunities for the involvement of international investors, corporations and business actors in supporting regional development*

**Keywords :** *Local Communities; State Capitalism; Special Economic Zones*

## A. PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki peran strategis dalam menunjang perekonomian. Kebermanfaatannya dalam pembangunan di sektor pariwisata telah menjadi salah satu bidang kajian yang menjadi perhatian ilmuwan ekonomi dan sosial. Beberapa penelitian mendokumentasikan manfaat pembangunan sektor pariwisata terhadap berbagai bidang seperti pertumbuhan bisnis dan pelaku usaha pariwisata lokal (Zebryte & Jorquera, 2017), korporasi akomodasi (Davidson & Sahli, 2015), serta manfaat pariwisata bagi asosiasi industri dan korporasi yang mewakili sektor ekonomi pasar

(Gleckman, 2018). Dalam perspektif negara, sektor pariwisata dianggap strategis dalam upaya meningkatkan produk domestik bruto, jumlah wisatawan, penerimaan devisa, dan peningkatan investasi modal (Işik, 2015). Pembangunan pariwisata diyakini memiliki manfaat *trickle down effect* bagi masyarakat luas sehingga menjadi strategi dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan devisa (Okello & Novelli, 2014), serta menyediakan lapangan pekerjaan (Ketshabile, 2009).

Pesatnya globalisasi turut mempengaruhi pembangunan industri pariwisata melalui pengembangan kawasan objek wisata sebagai basis industri unggulan yang dapat memberikan manfaat perekonomian bagi masyarakat luas (Erkin & Odilov, 2023; Silviana et al., 2021). Beriringan dengan semakin pesatnya pembangunan pariwisata, peneliti sosial turut menyoroti pentingnya distribusi kebermanfaatan ekonomi pariwisata bagi masyarakat lokal. Kebermanfaatan ekonomi pariwisata bagi masyarakat lokal menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengembangan pariwisata berkelanjutan (Mak et al., 2017). Pembangunan pariwisata yang berorientasi pada masyarakat lokal memiliki dampak positif seperti peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat lokal dalam meningkatkan taraf hidup (Cooper & Hail, M, 2016) dan memunculkan diversifikasi mata pencaharian (Snyman, 2014), (Iorio & Corsale, 2013), (Valentina & Elsera, 2023).

Besarnya potensi ekonomi pariwisata mendorong pemerintah Indonesia untuk mengembangkan pariwisata salah satunya melalui format kawasan ekonomi khusus. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan strategi Pemerintah Indonesia dalam percepatan pertumbuhan perekonomian nasional. Kawasan Kuta Mandalika merupakan salah satu kawasan yang dinilai memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis dalam menjalankan aktivitas ekonomi pariwisata yang berdaya saing internasional. Upaya menghadirkan daya tarik pariwisata kelas dunia termanifestasi dalam penyelenggaraan *Event* Balap Motor Grand Prix (MotoGP) tahun 2022 di Sirkuit Mandalika yang berada di KEK Mandalika.

Terlaksananya ajang balap internasional di Sirkuit Mandalika menjadikan KEK Mandalika sebagai salah satu KEK dengan kinerja optimal (Laporan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus 2022). Menariknya capaian tersebut tidak dapat dipisahkan dari realitas besarnya dukungan institusional negara melalui intervensi regulasi dan mobilisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai salah satu ciri pendekatan kapitalisme negara. Praktik kapitalisme negara merupakan salah satu strategi pembangunan ekonomi dengan peran negara yang terlibat aktif dalam aktivitas ekonomi dan pembangunan melalui peran BUMN. BUMN dewasa ini telah menjadi agen pembangunan yang penting dalam mendukung kebijakan pembangunan pemerintah (Kim, 2022). Peran tersebut semakin diperluas dalam pembangunan infrastruktur melalui kebijakan pengembangan kawasan ekonomi khusus dalam mendukung sirkularitas ekonomi di sektor pariwisata (Setiawan Chaniago et al., 2023).

Pengembangan kawasan ekonomi khusus yang secara langsung atau tidak langsung dioperasikan oleh pemerintah merupakan respon dalam merevitalisasi peran kebijakan ekonomi khususnya akibat tidak optimalnya peran pasar (Mazzucato, 2015). Beberapa kajian sebelumnya telah mendokumentasikan bahwa pembangunan pariwisata di Lombok seringkali memunculkan dinamika konflik (Fallon, 2001), (Fallon, 2015), hambatan ekonomi bagi masyarakat lokal (Schellhorn,

2010) serta dominannya agenda internasional dalam pembangunan pariwisata lokal Lombok (Hampton & Jeyacheya, 2015). Strategi kapitalisme negara yang dipraktikkan oleh negara untuk menghidupkan aktivitas pelaku usaha melalui event internasional di KEK Mandalika menarik untuk ditelaah sebab telah menghadapkan masyarakat lokal ke dalam situasi infiltrasi kapitalisme negara yakni disatu sisi dituntut untuk beradaptasi pada perubahan aktivitas ekonomi pariwisata sedangkan di sisi lain terdampak dari kebijakan relokasi akibat kebijakan pembangunan.

Beberapa kajian kapitalisme negara cenderung melihat dinamika intervensi statisme pada sektor strategis, korporasi serta entitas pembangunan ekonomi makro (Sperber, 2019; Kim, 2022). Penelitian ini membawa isu masyarakat lokal dalam diskusi akademik intervensi kapitalisme negara yang cenderung mengabaikan dimensi lokalitas sebagai realitas pembangunan sosial. Padahal masyarakat lokal, sebagai lini yang dianggap paling pinggir dalam pembangunan ekonomi justru seringkali terdampak secara langsung akibat kebijakan negara dalam pembangunan. Berdasarkan kondisi tersebut penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implikasi bekerjanya konfigurasi kapitalisme negara dalam operasional kawasan ekonomi khusus mandalika terhadap pembangunan sektor ekonomi pariwisata dan masyarakat lokal di kawasan.

## B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada studi kasus masyarakat lokal di Dusun Bunut dan Dusun Ujung Lauk yang terdampak pembangunan sirkuit di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Pendekatan kualitatif yang digunakan sejalan dengan tujuan penelitian yaitu ingin mengungkap pandangan masyarakat lokal tentang kebermanfaatan ekonomi dalam pembangunan kawasan dan pelaksanaan event MotoGP. Kebermanfaatan tersebut dilihat dari aktivitas keterlibatan pekerjaan saat event, manfaat *monetary*, kemudahan akses pekerjaan, kemudahan akses modal dan pengembangan kapasitas. Penelitian lapangan dilakukan sejak November 2021 hingga Maret 2022 mengikuti jadwal pelaksanaan *event* MotoGP 2022.

Basis data penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan masyarakat lokal dengan kriteria terlibat aktivitas pekerjaan saat event, terlibat ganti rugi dan masyarakat umum yang direlokasi. Wawancara juga dilakukan dengan pejabat instansi di tingkat kabupaten yang meliputi, administrator KEK, Badan Perencanaan pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah, Dinas Pariwisata dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Kabupaten Lombok Tengah dan aparatur di tingkat desa. Informan masyarakat lokal ditentukan dengan teknik *purposive* meminjam data hasil verifikasi warga untuk penempatan rumah khusus sebagaimana tertuang dalam *Resettlement Policy Framework of The Mandalika Urban and Tourism Project*. Data dikumpulkan dari 12 orang informan masyarakat lokal, lima informan aparatur pemerintahan di tingkat kabupaten dan empat informan aparatur pemerintahan di tingkat desa. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa laporan penyelenggaraan kawasan, dokumen dan laporan instansi pemerintahan.

Penelitian ini menggunakan teori kapitalisme negara dalam memahami posisi masyarakat lokal dalam konfigurasi kapitalisme negara yang berfokus pada tiga konsep yakni *pertama* intervensi statisme berupa kebijakan, *kedua* perangkat

instrumentasi regulasi dan *ketiga*, fasilitas penyediaan infrastruktur. Ketiga konsep tersebut dipergunakan untuk menganalisis dua bahasan diskusi yakni dampak ekonomi penyelenggaraan *event* serta karakteristik intervensi statisme dalam kapitalisme negara. Kedua poin tersebut dipergunakan untuk mengelompokkan data/temuan pada tahap pengkodean. Data tersebut berupa transkrip wawancara, catatan observasi dan data sekunder instansi yang dikumpulkan selama penelitian. Analisis data dilakukan dengan menelaah secara mendalam bentuk-bentuk pandangan, pemaknaan dan kesan yang terungkap dalam penelitian. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara deskriptif dan dipaparkan dalam tiga kelompok diskusi berupa *pertama*, konfigurasi kapitalisme negara dalam operasionalisasi KEK Mandalika, *kedua*, bentuk dampak ekonomi bagi masyarakat lokal dan *ketiga*, karakteristik intervensi statisme negara.

### C. TINJAUAN PUSTAKA

Keterlibatan peran negara dalam aktivitas perekonomian telah menjadi salah satu fokus perdebatan dalam pembangunan ekonomi. Keterlibatan negara diantaranya dapat dilihat dari posisi dan peran negara dalam kegiatan pasar. Salah seorang pemikir ekonomi politik klasik yakni Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* (Smith, 1998) dan John Stuart Mill dalam karyanya *Prinsipil of Political Economy* (Mill, 1885) menekankan posisi dan peran negara sebagai penyelaras dan pemberi dukungan sebatas apa yang dibutuhkan oleh pasar. Pespektif ini menganggap bahwa campur tangan pemerintah atau negara dalam aktivitas ekonomi tidak diperlukan kecuali untuk menjamin keberlangsungan ekonomi yang diatur oleh pasar. Dengan prinsip *Laissez Faire* penganut perspektif ini menginginkan adanya kebebasan atas pasar yang mengatur dirinya sendiri (*invincible hand*) yang dilandasi dengan proses depolitisasi ekonomi dari peran negara. Individu secara alami dianggap sebagai *homo economicus* yang secara rasional dapat mengakses keuntungan dari aktivitas ekonomi yang tercipta di pasar.

Depolitisasi peran negara sebagaimana digaungkan oleh penganut ekonomi politik klasik ditentang oleh ekonomi politik Marxian. Dalam perspektif ekonomi politik Marxian, kebebasan yang digaungkan melalui depolitisasi peran negara hanya akan menciptakan kelas sosial yang bermuara pada pertentangan kelas (pemilik modal dan pekerja). Bagi Marx kekuasaan ekonomi dan politik memiliki pertalian yang sangat erat. Strategi negara yang memfasilitas korporasi melalui mode investasi merupakan wujud dominasi yang memperluas disparitas ketimpangan antara kelas pekerja dan pemilik modal. Pandangan Marx juga bertumpu pada keadilan dimana negara perlu mengambil peran dalam sistem kepemilikan dan pengaturan sumberdaya. Meskipun dalam banyak praktek pandangan ini justru dilakukan oleh beberapa negara berupa *totalitarian state capitalism*.

Konsep awal kapitalisme negara tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Karl Marx. Pengaruh pemikiran Marx terhadap konsep kapitalisme negara baik secara ideologis maupun secara praktis melalui praktik-praktik intervensi negara. Marx menggambarkan kapitalisme dalam komposisi antagonistik kelas proletar dan borjuis. Meskipun Marx cenderung tidak mengabaikan peran negara khususnya dalam mengartikulasikan sejumlah pengaturan tentang modal dalam menciptakan keadilan kelas. Namun pemikiran tersebut cenderung mengabaikan peran ekspansi kepemilikan negara dalam aktivitas ekonomi. Ekspansi kepemilikan modal negara

dalam aktivitas ekonomi menimbulkan dampak institusional peran negara yang semakin meluas. Perluasan peran negara ini oleh neo-marxis melahirkan pendekatan *dirigisme* negara dalam pengaturan aktivitas ekonomi yang seringkali dipahami sebagai kapitalisme negara.

Terminologi Kapitalisme negara pertama kali diperkenalkan oleh Wilhelm Liebknecht (Liebknecht, 1986). Liebknecht menyebutkan,..."sosialisme negara sebenarnya adalah kapitalisme negara". Pemikiran ini menunjukkan bahwa negara negara menjadi pusat otoritas yang mewujudkan kekuasaan dan pemikiran tentang ekonomi secara terpusat. Menurut Speber kapitalisme negara tidak bisa dilepaskan dari paham Marxis dan dikembangkan dalam beberapa variasi kontekstualitas. *Pertama*, kapitalisme negara merujuk pada pernyataan-pernyataan awal Marxis mengenai perluasan ekonomi negara-negara Eropa pada akhir abad ke-19. *Kedua*, teori kapitalisme negara yang dirumuskan pada paruh pertama abad ke 20 sebagai respons terhadap pengalaman perang dan fasisme. *Ketiga*, Kapitalisme negara sebagai gambaran kritis mengenai uni-soviet sebagai sebuah formasi negara-kapitalis yang berasal dari sayap-kiri anti stalinis. *Keempat*, Teori Marxis mengenai kapitalisme monopoli negara-negara Barat selama decade pascaperang. *Kelima*, kapitalisme negara dalam kajian neo-Marxis mengenai perekonomian Dunia Ketiga pada tahun 1970an dan 1980an yang menafsirkan kapitalisme negara sebagai jalur pembangunan alternatif antara ketergantungan dan sosialisme. *Keenam*, Gelombang terbaru kapitalisme negara baru negara-negara berkembang era sekarang (Sperber, 2019).

Penelitian ini meminjam konsep kapitalisme negara yang didefinisikan sebagai kapitalisme yang dipraktikkan oleh negara melalui intervensi statisme dan peran Badan Usaha Milik Negara yang dioperasionalkan dalam melihat kebermanfaatan aktivitas ekonomi di KEK Mandalika. Teori kapitalisme negara yang digunakan berorientasi pada kapitalisme negara model Prussia yang cenderung menggunakan pendekatan intervensi ekonomi yang diambil alih oleh negara melalui peran BUMN dalam menetralkan kapitalisme yang tidak hanya berorientasi pada bisnis namun juga pembangunan sosial dan kepentingan masyarakat luas. Dalam pendekatan ini, negara dapat menggunakan instrument statisme untuk mencapai keadilan sosial dan menetralkan liberalisme pasar. Konsep kapitalisme negara dioperasionalkan dalam konteks pengembangan aktivitas ekonomi pariwisata dilihat dalam intervensi statisme kerangka kebijakan, instrumentasi regulasi dan penyediaan infrastruktur dalam aktivitas ekonomi di KEK Mandalika. Statisme sendiri didefinisikan sebagai kekuasaan dan hak prerogatif dan otonomi yang dimiliki oleh negara untuk memobilisasi sumberdaya dalam pengaturan ekonomi dalam mencapai tujuan pembangunan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konfigurasi Kapitalisme Negara di KEK Mandalika

Konfigurasi kapitalisme negara dalam pengembangan KEK Mandalika secara kelembagaan dapat dilihat dalam basis struktur politik dan struktur ekonomi yang mendukung operasionalisasi kawasan. Konfigurasi kapitalisme negara dalam operasionalisasi kawasan ekonomi khusus mengacu pada struktur kelembagaan politis yang dikelola oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Secara politis operasionalisasi berada dalam tiga unsur yakni Dewan Nasional Kawasan Ekonomi

Khusus, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional serta di tingkat daerah melalui Dewan Kawasan dan Administrator Kawasan. Sedangkan konfigurasi kapitalisme negara dalam struktur kelembagaan ekonomi secara langsung dijalankan oleh *Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC) selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) yang didukung oleh jejaring Badan Usaha Milik Negara dan pelaku usaha sektor pariwisata.

ITDC selaku BUPP Kawasan berfokus pada pembangunan kawasan dan pengembangan kerjasama melalui penyediaan lot-lot tanah berdasarkan zonasi pemanfaatan kawasan yang telah dirancang dalam Rencana Detail Tata Ruang kawasan. Aktivitas Pengembangan KEK Mandalika saat ini berlangsung dalam dua hal yakni *pertama* pembangunan infrastruktur kawasan dan infrastruktur kewilayahan. Aktivitas pembangunan infrastruktur ini berlangsung baik dari pembangunan yang bersumber dari program pemerintah pusat dalam proyek strategis nasional yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Proyek Infrastruktur yang didanai oleh Lembaga Pembiayaan Internasional maupun aktivitas investasi Badan Usaha Milik Negara. Dalam pembangunan infrastruktur kewilayahan dan kawasan, pemerintah dan ITDC setidaknya memperoleh dukungan berupa *Program Mandalika Urban Tourism and Infrastructure Project* (MUTIP) yang didanai oleh *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) senilai 341 juta dollar dan program *Indonesia Tourism Development Project* (ITDP) yang dibiayai oleh Bank Dunia sebesar 1,3 triliun rupiah.

*Kedua*, aktivitas pelaku usaha yakni berupa investasi berupa pembangunan sejumlah hotel. ITDC hingga tahun 2022 telah menjaring berbagai investasi beberapa pelaku usaha perhotelan dengan komitmen investasi pembangunan hotel keseluruhan mencapai 1,8 triliun rupiah (Laporan DNKEK, 2022). Untuk menghidupkan aktivitas pelaku usaha di KEK Mandalika ITDC juga melakukan kerja sama *Land Utilization and Development Agreement* (LUDA) dengan *Vinci Construction Grand Projects* (VCGP) untuk pembangunan kawasan *Sport and Entertainment* (*Sporttainment*) di lahan seluas 131 Ha dengan nilai investasi sebesar 1 miliar dollar. Kawasan *Sporttainment* terdiri dari Sirkuit Jalan Raya yang dilengkapi dengan perhotelan eksklusif yang mendukung kegiatan *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE). Kerjasama pembangunan kawasan *Sporttainment* tersebut berlanjut dengan penandatanganan kerjasama antara PT. ITDC dengan Dorna Sport untuk penyelenggaraan ajang Balap MotoGP. Pembangunan sirkuit jalan raya sepanjang 4,32 Km atau yang kemudian dikenal sebagai Sirkuit Mandalika berdampak pada proses relokasi 135 kepala keluarga yang berada di Dusun Bunut dan Dusun Ujung Lauk.

Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya merealisasikan Sirkuit Mandalika sebagai tuan rumah penyelenggaraan *Event* MotoGP tahun 2022 dilakukan dengan melibatkan sumberdaya kapitalisme negara yang sangat besar. Berdasarkan rilis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, untuk mendukung terselenggaranya *Event* MotoGP 2022 pemerintah telah mengalokasikan dana APBN hingga 2,49 triliun rupiah. Besaran tersebut terdiri atas 1,3 triliun rupiah untuk pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur dasar sirkuit, alokasi anggaran melalui kementerian dan lembaga sebesar 1,18 triliun rupiah serta pemberian fasilitas kepabeanan, perpajakan bahan modal untuk pembangunan kawasan sebesar 17,75 miliar rupiah. Untuk penyelenggaraan *Event* MotoGP

pemerintah juga membayar *fee* gelaran kepada Dorna selaku pemilik lisensi balapan sebesar 143 miliar. Intervensi statisme negara juga dilakukan dengan memberikan fasilitasi kemudahan perpajakan, bea masuk dan cukai. Saat *event* negara memfasilitasi pelaku usaha dengan menerbitkan 15 dokumen pemberitahuan jasa KEK dengan nilai transaksi mencapai 2 triliun rupiah, negara juga memfasilitasi 7 dokumen *masterlist* dengan nilai barang mencapai USD 123,4 Ribu Dollar America dan EUR 677,7 ribu selama event.

Dukungan statisme negara dalam menundukung *event* MotoGP juga dilakukan melalui mobilisasi sumberdaya Badan Usaha Milik Negara. Dibidang akomodasi, untuk memenuhi kebutuhan hotel saat event negara menggerakkan sejumlah BUMN untuk pembangunan Hotel Pullman melalui pembiayaan yang bersumber dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (*Eximbank*) sebagai BUMN Kementerian Keuangan yang memberikan Skema *Nasional Interest Account* untuk pembiayaan pembangunan hotel senilai 709 miliar rupiah. Untuk mendukung pembiayaan dalam penyelenggaraan *Event* MotoGP juga dilakukan melalui mobilisasi BUMN Perbankan. Melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) turut ambil bagian dalam penyediaan kredit sindikasi untuk pembangunan jalan kawasan khusus/*street circuit* hingga sebesar 400 miliar rupiah. Selain itu HIMBARA juga memberikan penyediaan kredit sindikasi untuk pembangunan Jalan Kawasan Khusus sebesar 400 miliar, penyediaan modal kerja *event* sebesar 150 miliar rupiah dan penyediaan *standby letter of credit* sebesar 14,6 Juta Euro. Selain itu, BUMN penjaminan korporasi juga ambil bagian dalam penjaminan fasilitas pendanaan yang diperoleh ITDC melalui lembaga pembiayaan seperti *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB).

Intervensi statisme dalam kapitalisme negara melalui aktivitas pembangunan dan pelaksanaan *event* menciptakan sirkularitas ekonomi baik melalui sejumlah BUMN maupun mendorong manfaat makro pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur pariwisata. Pasca penyelenggaraan *Event* MotoGP di Sirkuit Mandalika 2022, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) melakukan perhitungan dampak ekonomi penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Dari kajian tersebut diketahui bahwa dari 2,7 triliun yang dikeluarkan oleh pemerintah berhasil mendapatkan manfaat ekonomi langsung sebesar 3,9 triliun rupiah dan 1,2 triliun dampak tidak langsung yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Total diperoleh manfaat makro sebesar 5,1 triliun atau dalam data yang dirilis oleh *Mandalika Grand Prix Association* (MGPA) sebesar 4,5 triliun (Rilis themandalikago tanggal 11 agustus 2022).

Pada tataran provinsi, *Event* MotoGP Mandalika diklaim berdampak pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi NTB sebesar 1,46% (*year on year*), dimana sektor transportasi dan pergudangan menyumbang pertumbuhan sebesar 0,74% dan sektor makanan dan minuman sebesar 1,04% (Rilis themandalikago tanggal 11 agustus 2022). Masih dalam rilis yang sama, pelaksanaan *event* MotoGP Mandalika 2022 diglorifikasi dalam mengangkat pertumbuhan perekonomian di Provinsi NTB yang pada periode tersebut sebesar 7,76%. Padahal jika dilihat dari komposisi usaha yang menopang perekonomian di Provinsi NTB, sektor usaha pariwisata khususnya bidang akomodasi, makanan dan minuman hanya berkontribusi sebesar 1,71% dari total PDRB Provinsi NTB. Dari 17 jenis komposisi

usaha, sektor pertanian dan pertambangan merupakan lapangan usaha yang berkontribusi paling besar yakni total 41,98%. (Statistik Pertumbuhan Ekonomi Prov NTB Triwulan 1 2022).

Pada skala Kabupaten Lombok Tengah dampak ekonomi pelaksanaan *event* MotoGP Mandalika 2022 menyumbang pajak sebesar Rp12.422.508.320. Jumlah tersebut didapatkan dari pajak penjualan tiket sebesar Rp11.685.491.320, pajak katering sebesar Rp540.000.000, pajak reklame sebesar Rp174.000.000 dan pajak parkir sebesar Rp23.017.000. Jumlah tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan. Belum optimalnya capaian kontribusi pajak dari pelaksanaan *event* MotoGP salah satunya disebabkan oleh besaran pajak yang ditarik hanya sebesar 15%. Angka tersebut jauh di bawah besaran pajak yang ditetapkan sesuai Peraturan Daerah Lombok Tengah yakni sebesar 30%. Kondisi pandemi yang mempengaruhi jumlah penonton juga menjadi salah satu penyebab masih belum tercapainya target pajak dalam penyelenggaraan ajang tersebut. Apalagi jika dilihat dari jumlah total penonton dimana secara total Indonesia hanya menempati posisi 11 dari jumlah penonton terbanyak dalam 19 seri balapan yang dilaksanakan oleh Dorna Sport (Detik.com 19 Nov 2022). Selama tiga hari pelaksanaan *event* MotoGP Mandalika jumlah penonton akumulatif sebanyak 102.801 penonton dengan rincian 9.857 dihari pertama, 30.021 di hari kedua (kualifikasi) dan di hari ketiga sebanyak 62.923 penonton.

Pada tataran masyarakat lokal, 135 kepala keluarga yang direlokasi akibat pembangunan Sirkuit Mandalika justru paling terdampak. Sejak proses pembangunan sirkuit dilakukan dilakukan pada akhir tahun 2019, masyarakat lokal harus pindah ke tempat relokasi sementara di Hak Pengelola (HPL) 94 milik ITDC yang oleh warga disebut dengan Dusun Bunut Hijrah. Masyarakat yang direlokasi mendapatkan kompensasi ganti rugi lahan dengan kisaran Rp60.000.0000 sampai Rp80.000.000 tergantung lokasi tanah. Selain itu mereka juga mendapatkan kompensasi bantuan bongkar bangunan rumah sebesar Rp3.000.000 dan ganti rugi tanaman. Proses relokasi dilakukan secara bertahap menyesuaikan proses negosiasi ganti rugi lahan.

Saat *event* MotoGP ditemukan  $\pm 10$  kepala keluarga yang masih bertahan di kawasan sirkuit dikarenakan belum memperoleh bayaran akibat belum sepakat dengan harga tanah, klaim kepemilikan dengan pihak pengelolaan hingga salah pembayaran akibat konflik keluarga. Secara teknis proses ganti rugi dan konflik kepemilikan lahan di kawasan tidak terganggu proses pembangunan kawasan dikarenakan adanya penerapan sistem konsinyasi yang menjamin pemegang HPL dapat melakukan pembangunan fisik meskipun proses sengketa sedang berlangsung di pengadilan. Apalagi dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang mengkategorikan lahan KEK sebagai bagian dari pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Hal tersebut semakin memperlemah posisi masyarakat lokal dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung. Besarnya peran statisme negara untuk merealisasikan *event* melalui sejumlah kebijakan seperti relokasi justru memperlemah posisi masyarakat lokal untuk mengakses manfaat. Masyarakat lokal menghadapi proses relokasi yang berlarut-larut ( $\pm 2$  tahun). Di sisi lain masyarakat lokal juga dituntut untuk beradaptasi dan bertransformasi dalam aktifitas industrialisasi pariwisata seiring dengan hadirnya berbagai event bertaraf internasional di kawasan.

## 2. Manfaat Event Bagi Masyarakat Lokal: “Ribut Laguq Untung”

Isu kebermanfaatan dalam penelitian ini berfokus pada implikasi ekonomi dalam penyelenggaraan MotoGP 2022 dari perspektif masyarakat lokal. Kebermanfaatan ekonomi pada penelitian ini dilihat dari keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas pekerjaan saat *event* dan kebermanfaatan dari usaha mandiri melalui aktivitas perdagangan skala rumah tangga. Implikasi ekonomi dalam penelitian ini bertumpu pada lima aspek mendasar yakni terkait keterlibatan dalam *event*, manfaat *monetary* yang diperoleh, kemudahan akses pekerjaan, kemudahan akses modal dan peningkatan kapasitas serta implikasi *event* terhadap perubahan aktivitas ekonomi dan pendapatan rumah tangga.

Ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal merupakan salah satu potensi yang paling diharapkan dalam keberadaan KEK Mandalika. Apalagi sejak Sirkuit Mandalika dibangun di dalam kawasan KEK dan siap menggelar berbagai *event* internasional, wacana serapan tenaga kerja lokal menjadi tuntutan utama. Dalam pelaksanaan *event* MotoGP Mandalika 2022, ITDC selalu Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP) melibatkan 533 pekerja lokal yang terdiri atas 215 pekerja kebersihan dan 338 lainnya dipekerjakan sebagai marshal. Peluang pekerjaan saat *event* menjadi salah satu tuntutan utama bagi masyarakat lokal untuk memperoleh kebermanfaatan. Tuntutan tersebut tidak terlepas dari pengalaman masyarakat lokal yang dilibatkan pada saat pelaksanaan *event* World Superbike (WSBK) 2021 yang dianggap belum memuaskan. Ketidakpuasan itu dikarenakan karakteristik pekerjaan yang ditawarkan hanya pekerjaan yang bersifat temporal (pada saat *event*). Apalagi jika dilihat dari jenis pekerjaan yang kembali ditawarkan tidak jauh berbeda dengan *event* sebelumnya yakni sebagai tenaga kebersihan dan *marshall*. Masyarakat di lingkaran kawasan menyuarakan ketidakpuasan terhadap pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan event internasional melalui berbagai rangkaian aksi demonstrasi.

Implikasi ekonomi dalam keterlibatan masyarakat lokal untuk *event* MotoGP sebagai pekerja dapat dilihat dari manfaat *monetary* berupa penghasilan. Para pekerja yang terlibat umumnya mendapatkan bayaran berkisar Rp100.000 hingga Rp250.000 perhari. Jumlah besaran bayaran yang diperoleh bergantung pada jenis pekerjaan dan durasi ikatan kerja. Para pekerja yang terkategori sebagai relawan saat event umumnya dipekerjakan dalam waktu tiga hingga lima hari. Sedangkan jenis pekerjaan tertentu seperti *security* dan tenaga kebersihan yang dipekerjakan di hotel yang operasional sementara saat *event* dipekerjakan selama dua minggu. Gambaran penghasilan masyarakat lokal yang terlibat dalam aktivitas pekerjaan saat *event* MotoGP 2022 dipaparkan pada tabel berikut.

**Tabel 1. Penghasilan Masyarakat Lokal Saat Event MotoGP 2022**

Jenis Pekerjaan	Besaran Upah	Lama Kerja	Total Penghasilan
<i>Marshall</i>	Rp200.000/hari	3 hari	Rp600.000
<i>Cleaning Servis</i>	Rp180.000/hari	6 hari	Rp1.600.000
<i>Gardener</i>	Rp100.000/hari	5 hari	Rp500.000
<i>Suttle Crew</i>	Rp312.500/hari	4 hari	Rp1.250.000
<i>Crowd Control</i>	Rp200.000/hari	3 hari	Rp600.000

Sumber: hasil wawancara penelitian Juli 2022

Besaran penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat lokal yang terlibat pekerjaan saat *event* cukup variatif sesuai dengan jenis pekerjaan dan lamanya waktu bekerja. Selain itu, lokasi pekerjaan yang ditawarkan oleh *vendor* yang berbeda juga berdampak pada perbedaan besaran penghasilan yang didapat. Misalnya saja tenaga kebersihan yang dipekerjakan saat *event* dengan waktu kerja tiga hingga lima hari mendapatkan penghasilan yang berbeda dengan tenaga kebersihan yang dipekerjakan di hotel dengan waktu kerja hingga dua minggu. Selain itu, bagi masyarakat lokal, bekerja dalam *event* bertaraf internasional dibayangkan sebagai pekerjaan yang prestisius dan membawa kebanggaan. Para pekerja yang terlibat dalam kegiatan *event* memperoleh sertifikat yang dapat dipergunakan sebagai akses pekerjaan pada *event* lain yang diselenggarakan pengelola kawasan.

Kemudahan akses pekerjaan menurut penilaian masyarakat lokal bergantung pada relasi sosial dan status sebagai masyarakat lokal terdampak pembangunan kawasan. Relasi sosial menjadi penting sebagai sumber untuk mendapatkan informasi kerja bagi masyarakat lokal. Meskipun *vendor* yang menawarkan pekerjaan umumnya mendistribusikan informasi rekrutmen kerja di *website* maupun media sosial namun masyarakat lokal cenderung lebih mengandalkan informasi rekrutmen kerja melalui aparaturnya tingkat desa dan dusun. Bagi masyarakat lokal, jaringan relasi sosial baik hubungan pertemanan dan kekeluargaan serta status sebagai orang lokal menjadi modalitas dalam memperoleh pekerjaan saat *event*. Status masyarakat lokal sebagai terdampak pembangunan kawasan juga menjadi modalitas penting dalam memperoleh akses pekerjaan. Hal tersebut tidak terlepas dari hasil kesepakatan masyarakat saat proses perencanaan pengembangan KEK Mandalika yang menjanjikan setiap satu keluarga memperoleh satu pekerjaan di kawasan. Pelaksanaan *event* seperti MotoGP menjadi momentum bagi masyarakat lokal untuk memperoleh pekerjaan ataupun menjadi sukarelawan *event*.

Dari sisi peningkatan kapasitas, masyarakat lokal yang terlibat aktivitas pekerjaan mendapatkan kesempatan pelatihan sebagai bagian dari proses *recruitment* pekerjaan. Masyarakat yang terlibat sebagai pekerja atau sukarelawan memperoleh pelatihan dan arahan pra pelaksanaan *event*. Misalnya saja *marshall* yang bertugas saat *event* yang menuturkan mengikuti masa pelatihan singkat selama dua hari sebagai persiapan. Singkatnya masa persiapan pelatihan *marshall* sempat menjadi sorotan saat penyelenggaraan *event*. Kondisi tersebut disikapi penyelenggaraan dengan mengelaborasi *marshall* lokal dengan *marshall* yang telah terlibat *event* nasional maupun internasional. Pengalaman dan keterlibatan kerja juga diapresiasi dalam bentuk piagam atau sertifikat keterlibatan dalam *event* yang bisa dimanfaatkan dalam akses pekerjaan saat *event* berikutnya.

Bagi masyarakat lokal yang terlibat aktivitas pekerjaan, *event* MotoGP belum berimplikasi signifikan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga. Meskipun kehadiran *event* membuka peluang kerja baru namun sifat pekerjaan sebagai relawan dan periode kerja yang bersifat temporal berdampak sebatas memberikan pemasukan tambahan untuk menopang perekonomian keluarga. Hal tersebut tidak terlepas dari jenis pekerjaan yang tersedia masih dominan pekerjaan kasar. Di sisi lain, pelaksanaan *event* MotoGP 2022 menimbulkan beberapa kekecewaan bagi masyarakat lokal. Kekecewaan tersebut seperti; *pertama*, pekerjaan yang ditawarkan bersifat temporal sebatas relawan. *Kedua*, besaran upah yang dianggap kurang sebanding dengan citra internasional *event*. *Ketiga*, jenis pekerjaan yang ditawarkan

masih terbatas pada pekerjaan *low skill* yang dinilai rendah. Keempat, persentase masyarakat lokal khususnya yang terdampak langsung pembangunan sirkuit dalam aktivitas *event* masih kecil. Tantangan dalam optimalisasi kebermanfaatan bagi masyarakat luar juga dilihat dari masih terbatasnya akses pekerjaan di sektor strategis.

Untuk memperluas kebermanfaatan ekonomi pada saat gelaran *event* MotoGP 2022, penyelenggara memfasilitasi penyediaan *stand* UMKM berbayar maupun gratis. *Stand* UMKM berbayar ditujukan untuk UMKM nasional dan UMKM lokal yang telah melewati proses kurasi di Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Tengah. Sedangkan *stand* UMKM gratis merujuk pada 54 *stand* UMKM yang diperuntukkan untuk masyarakat lokal terdampak pembangunan sirkuit Mandalika dan masyarakat lingkaran kawasan yang berlokasi di depan gerbang sirkuit. Adapun implikasi ekonomi pada masyarakat lokal yang melakukan usaha mandiri saat *event* MotoGP sebagaimana diungkap dalam penelitian ini merujuk pada aktivitas perdagangan skala rumah tangga yang dilakukan masyarakat lokal di 54 *stand* yang menjadi sentral kuliner.

Keberadaan sentral kuliner yang menyediakan *stand* gratis diharapkan dapat memberikan akses kebermanfaatan bagi masyarakat lokal secara luas. *Stand* usaha tersebut dimanfaatkan masyarakat lokal untuk berdagang berbagai jenis makanan dan minuman khas Lombok. Penelitian ini menelusuri manfaat ekonomi berupa penghasilan pedagang selama tiga hari gelaran *event* MotoGP 2022. Di hari pertama dan kedua *event* yang merupakan sesi *pre-practise* dan kualifikasi *event*, mayoritas pedagang mengakui tidak mendapatkan pembeli di *stand* dagangan mereka. Kondisi serupa juga ditemukan pada sejumlah pedagang di *stand-stand* yang berada pada *side event* yang tersebar di luar sirkuit seperti sentral kuliner di kawasan Masjid Nurul Bilad, area parkir dan beberapa titik lain.

Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen transportasi yang diterapkan saat *event* MotoGP 2022 berdampak pada ketidakefektifan manfaat yang diperoleh masyarakat lokal yang difasilitasi berjualan di *stand* UMKM gratis. Kebijakan penyediaan transportasi gratis sebagai bagian dari manajemen pengaturan lalu lintas berdampak pada arus pergerakan penonton yang terkendali sesuai dengan titik-titik penjemputan yang telah disediakan. Lokasi *stand* gratis yang disediakan untuk masyarakat lokal berada di luar jalur transportasi yang dipergunakan penonton berdampak pada *stand* usaha mereka yang tidak dikunjungi pembeli karena operator transportasi mengantarkan penonton ke titik-titik penjemputan yang telah disediakan dan langsung menuju ke dalam arena sirkuit.

Kebijakan penyediaan transportasi gratis sempat ditentang sejumlah komunitas masyarakat. Protes tersebut salah satunya muncul dari supir transportasi lokal bersama forum kepala desa lingkaran kawasan KEK. Tuntutan masyarakat tersebut tidak terlepas dari harapan besar masyarakat lokal untuk mendapatkan manfaat yang besar dari penyelenggaraan *event* di sektor jasa transportasi. Kendati demikian, kebijakan transportasi gratis tetap dijalankan sebagai bagian dari upaya pengaturan lalu lintas penonton selama *event*. Untuk menunjang kelancaran transportasi pemerintah juga menginstruksikan pembatasan aktivitas masyarakat seperti larangan melaksanakan kegiatan sosial seperti acara pernikahan ataupun kegiatan kemasyarakatan yang berpotensi menimbulkan konsentrasi massa yang dapat mengganggu lalu lintas menuju sirkuit.

Dampak pengaturan transportasi dan pengaturan arus penonton sangat dirasakan oleh sejumlah masyarakat lokal yang berdagang di stand UMKM gratis dan stand ditempatkan di *side event* yang tersebar di luar sirkuit seperti sentral kuliner di kawasan Masjid Nurul Bilad, area parkir dan beberapa titik lain. Kondisi masyarakat yang berdagang di *stand-stand* yang disediakan membaik pasca acara balapan sesi final selesai. Hal tersebut disebabkan kemacetan parah yang muncul pasca balapan selesai membuat arus balik transportasi terhenti total. Kondisi tersebut mengakibatkan penonton berjalan menuju titik-titik penjemputan maupun menuju titik parkir. Kemacetan panjang yang terjadi membuat penonton terjebak di kawasan hingga enam jam berdampak positif pada dagangan pedagang yang habis dibeli penonton. Beberapa pedagang juga memanfaatkan keramaian untuk menjajakan makanan dan minuman memanfaatkan kondisi penonton yang kelaparan dan kehausan di tengah kemacetan.

Kondisi kemacetan parah pasca balapan juga dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk menawarkan jasa transportasi. Para pedagang dan masyarakat lokal mulai beralih menawarkan jasa ojek kepada penonton yang ingin segera keluar dari kondisi kemacetan. Kericuhan pengaturan transportasi pasca balapan digambarkan masyarakat lokal dengan istilah "*ribut laguq untung*" atau kekacauan akibat kemacetan justru menguntungkan. Bagi pedagang kekacauan akibat kemacetan parah penonton membawa keuntungan dimana mereka bisa menutupi kerugian yang muncul dihari pertama dan kedua *event*. Pedagang menuturkan memperoleh penghasilan Rp1.500.000 hingga Rp2.500.000 memanfaatkan situasi kemacetan pasca gelaran. Selain itu masyarakat lokal juga memperoleh penghasilan dari menawarkan jasa ojek berkisar Rp500.000 hingga Rp750.000.

Pasca gelaran *event* MotoGP 2022, mayoritas pedagang tidak lagi menempati *stand* sentra kuliner yang disediakan. Berdasarkan observasi yang dilakukan satu bulan pasca gelaran tersisa hanya lima orang pedagang yang masih menempati *stand* usaha yang disediakan. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan beberapa penyebab pedagang berhenti berjualan yaitu; *pertama*, sepihnya aktivitas wisatawan di kawasan akibat belum pulihnya kondisi pariwisata pasca *pandemic covid*. *Kedua* keterbatasan modal dan tidak adanya dukungan permodalan. Kondisi tersebut diperkuat pula dengan temuan penelitian dimana pedagang yang masih bertahan berjualan umumnya masih mengandalkan jasa bank keliling sebagai sumber permodalan. *Ketiga*, kesulitan aksesibilitas tempat tinggal ke tempat usaha yang ada di *stand* sentra kuliner. Hal ini tidak terlepas dari mayoritas masyarakat lokal yang berjualan di *stand* sentra kuliner merupakan masyarakat yang masih tinggal di tempat relokasi sementara dan masih menunggu di relokasi ke tempat tinggal permanen.

### 3. Karakteristik Statisme Negara

Peran statisme negara dalam pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika dapat dilihat dari beberapa aspek mendasar yang meliputi penciptaan kerangka kebijakan, instrumentasi regulasi dan penyediaan infrastruktur dalam menunjang aktivitas pembangunan untuk pelaku usaha di kawasan. Intervensi negara dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus yang ditopang melalui pembangunan infrastruktur kawasan untuk menstimulus aktivitas pelaku usaha dan investasi untuk menumbuhkan perekonomian di daerah cenderung berorientasi pada upaya menstimulasi aktivitas usaha berbasis korporasi. Kasus pengembangan

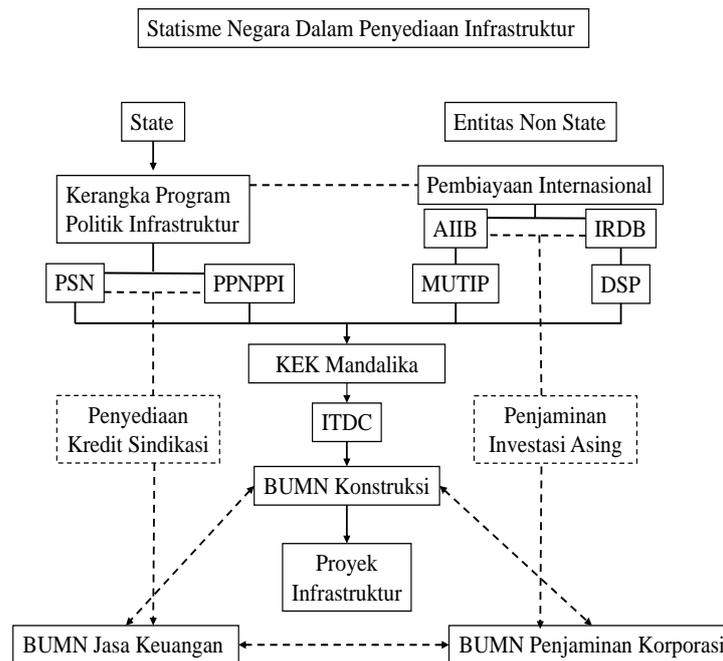
ekonomi pariwisata di KEK Mandalika dengan pendekatan kapitalisme negara tidak jauh berbeda dengan pembangunan pariwisata berbasis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dipraktikkan di beberapa negara seperti di Chile (Zebryte & Jorquera, 2017), Gambia (Davidson & Sahli, 2015), dan negara berkembang (Işik, 2015).

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan sektor pariwisata telah menjadi salah satu basis penting dalam penyediaan program pembangunan berbasis *developmental state capitalism*. Peran statisme negara dalam mendukung kebijakan pembangunan kawasan mandalika dapat dilihat dari dukungan penyediaan basis program. Pengembangan KEK Mandalika ditopang dalam tiga basis program besar pengembangan pariwisata yaitu; *pertama*, Program Prioritas Nasional Pembangunan Pariwisata Indonesia (PPNPPI). Melalui Program PPNPPI mandalika menjadi salah satu kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang dikembangkan sebagai sepuluh wilayah “Bali Baru”. *Kedua*, Program Proyek Strategis Nasional (PSN). Program PSN menjadi basis penyedia kebutuhan infrastruktur kepariwisataan yang didukung dengan jaminan penyediaan anggaran negara. *Ketiga*, Program Destinasi Super Prioritas. DSP merupakan bagian dari kerjasama Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia (*World Bank*) dalam *Indonesia Tourism Development Project* (ITDP). Program tersebut merupakan pembangunan pariwisata secara terintegrasi dan berkelanjutan yang menghubungkan enam Destinasi Super Prioritas yang ada di Indonesia (*Integrated Infrastructure Development for National Tourism Strategic Areas*).

Praktik kapitalisme negara dalam operasionalisasi KEK Mandalika juga didukung instrumentasi regulasi. Basis utama instrumentasi regulasi dalam operasionalisasi KEK Mandalika mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Selain itu, secara teknis operasionalisasi KEK juga diatur dalam beberapa aturan turunan seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan KEK dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus. Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja telah merasionalisasi ulang penyelenggaraan KEK Mandalika dalam berbagai bidang seperti perizinan berusaha, peran pemerintah pusat dan daerah, sistem upah hingga persoalan penanganan konflik lahan di kawasan.

Penyediaan infrastruktur merupakan ranah statisme penting terakhir dalam menunjang pengembangan KEK Mandalika. Penelitian ini menunjukkan intervensi statisme dalam penyediaan infrastruktur juga menggunakan strategi nasionalisme inklusif yakni membuka peluang pada keterlibatan investasi oleh negara (yang bersumber dari APBN) dan entitas pembiayaan internasional serta ekosistem BUMN negara dalam mendukung ITDC selaku BUMN yang berperan sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Mandalika. Pembangunan infrastruktur menjadi instrument penting bagi negara dalam menciptakan sirkularitas ekonomi dari aktifitas pembangunan infrastruktur. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di KEK Mandalika, ITDC setidaknya didukung oleh peran tiga BUMN yakni BUMN infrastruktur dan konstruksi, BUMN jasa keuangan dan permodalan, dan BUMN Penjaminan korporasi. Peran tiga BUMN tersebut sekaligus mempertegas fungsi BUMN sebagai agen pembangunan dalam mendukung kebijakan pemerintah (Kim, 2022). Adapun mekanisme operasional statisme dalam penyediaan infrastruktur di

KEK Mandalika dapat dilihat pada skema intervensi statisme penyediaan infrastruktur berikut ini.



**Gambar 1. Skema Intervensi Statisme Negara di KEK Mandalika**

Sumber : Olah Data Penelitian

Penelitian ini menemukan adanya ketimpangan kebermanfaatan ekonomi dalam kerangka kapitalisme negara yang dijalankan dalam operasionalisasi kawasan ekonomi khusus mandalika. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya distribusi kebermanfaatan pelaksanaan *event* bagi masyarakat lokal. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan hambatan kebermanfaatan bagi masyarakat lokal akibat konflik (Fallon, 2001), (Fallon, 2015), hambatan budaya, keterampilan dan pengetahuan pariwisata (Schellhorn, 2010), maupun akibat determinisme agenda internasional dalam pariwisata lombok (Hampton & Jeyacheya, 2015). Penelitian ini justru menunjukkan tidak optimalnya manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal akibat besarnya peran statisme negara melalui sejumlah kebijakan yang belum pro terhadap kepentingan ekonomi masyarakat lokal. Kebijakan seperti penyediaan transportasi gratis, pengaturan arus penonton hingga proses relokasi yang berlarut-larut turut berimplikasi pada upaya masyarakat lokal mengakses kebermanfaatan *event*.

Selain itu, pelaksanaan *event* di kawasan cenderung beroperasi dalam ranah tujuan politis dibandingkan pencapaian tujuan ekonomis. Dukungan statisme dalam pembangunan infrastruktur dan *event* secara politis diarahkan untuk menstimulasi aktivitas pelaku usaha di kawasan serta menarik minat investor untuk terlibat lebih jauh dalam pembangunan kawasan. Sejauh ini, investasi di kawasan mandalika baru terserap pada zona *sporrtainment* seluas 131 ha. Jumlah tersebut masih jauh dari total luas kawasan yang mencapai 1.035 ha. *Event* merupakan upaya singkat untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam menghidupkan aktivitas ekonomi pelaku usaha di kawasan. Dukungan besar statisme negara pada BUMN tidak sebatas mendorong sirkularitas ekonomi yang dimotori oleh BUMN namun lebih jauh bertujuan diplomatis guna menarik minat investasi yang lebih besar dari investor dan korporasi global di kawasan. Selain itu Peran BUMN juga penting dilihat dari kemampuannya beroperasi dalam skala kerugian yang terukur dalam pencapaian

tujuan politis negara sambil bertahan skema stimulus dan induksi modal negara untuk terus terlibat dalam sirkularitas ekonomi di kawasan.

#### E. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan adanya ketimpangan peran intervensi statisme negara dalam distribusi manfaat dari aktivitas pengaturan perekonomian oleh BUMN yang lebih berorientasi bisnis ketimbang pembangunan sosial yang berpihak pada masyarakat lokal. Hal tersebut dapat dilihat dari ketimpangan kebermanfaatan dalam pembangunan dan pelaksanaan *event* dan MotoGP 2022 dimana masyarakat lokal merupakan entitas yang memperoleh manfaat paling kecil. Hal tersebut disebabkan strategi pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan *event* di kawasan beroperasi dalam ranah tujuan politis dibandingkan pencapaian tujuan ekonomis di tingkat lokal. Dukungan statisme negara melalui *event* secara politis diarahkan untuk menstimulasi aktivitas pelaku usaha di kawasan serta menarik minat investor untuk terlibat lebih jauh dalam pembangunan kawasan dibandingkan berorientasi pada kebermanfaatan masyarakat lokal secara langsung. Konfigurasi aktor kapitalisme negara dalam operasional KEK Mandalika menunjukkan karakteristik kapitalisme negara yang bercorak nasionalisme inklusif ekonomi yang memadukan intervensi statisme negara melalui penguatan peran BUMN sekaligus membuka peluang pada keterlibatan investor internasional, korporasi dan pelaku usaha dalam mendukung pengembangan kawasan.

#### F. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada semua tim yang telah bekerjasama dalam proses pengambilan data serta informan warga Dusun Bunut dan Dusun Ujung Lauk yg telah meluangkan waktu berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait persoalan yang diteliti.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, C., & Hail, M. (2016). *Contemporary tourism: an international approach*. Goodfellow Publisher Limited.
- Davidson, L., & Sahli, M. (2015). Foreign direct investment in tourism, poverty alleviation, and sustainable development: a review of the Gambian hotel sector. *Journal of Sustainable Tourism*, 23(2), 167–187. <https://doi.org/10.1080/09669582.2014.957210>.
- Erkin, G., & Odilov, A. (2023). Lecturers at Silk Road International university of tourism and cultural heritage. *BEST JOURNAL OF INNOVATION IN SCIENCE*, 2(10), 412–416. [www.bjisrd.com](http://www.bjisrd.com).
- Fallon, F. (2001). Conflict, power and tourism on Lombok. *Current Issues in Tourism*, 4(6), 481–502. <https://doi.org/10.1080/13683500108667899>.
- Fallon, F. (2015, July 29). Beyond the Cina statistics- collaborating for tourism sustainability in Indonesia. *International Geographers' Union Tropical Tourism Outlook Conference*.
- Gleckman, H. (2018). *Multistakeholder Governance and Democracy: A Global Challenge*. Routledge.
- Hampton, M. P., & Jeyacheya, J. (2015). Power, Ownership and Tourism in Small Islands: Evidence from Indonesia. *World Development*, 70, 481–495. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.12.007>.

- Iorio, M., & Corsale, A. (2013). Diaspora and Tourism: Transylvanian Saxons Visiting the Homeland. *Tourism Geographies*, 15(2), 198–232. <https://doi.org/10.1080/14616688.2012.647327>.
- Işık, C. (2015). Foreign Direct Investment in Tourism: Panel Data Analysis of D7 Countries. *Athens Journal of Tourism*, 2(2), 93–103. <https://doi.org/10.30958/ajt.2-2-2>.
- Ketshabile. (2009). TOURISM POLICY AND THE ECONOMIC IMPACT OF TOURISM IN BOTSWANA. *Journal of Business and Management Dynamics (JBMD)*, 3(1), 107–115. [https://digitalknowledge.cput.ac.za/bitstream/11189/2451/1/ketshabile\\_tourism\\_jbmd\\_2009.pdf](https://digitalknowledge.cput.ac.za/bitstream/11189/2451/1/ketshabile_tourism_jbmd_2009.pdf).
- Kim, K. (2022). Key Features of Indonesia's State Capitalism Under Jokowi. *Journal of ASEAN Studies*, 10(2), 207–226. <https://doi.org/10.21512/jas.v10i2.9075>.
- Liebknicht, W. (1986). Justice. *London Congress*. <https://www.marxists.org/archive/liebknicht-w/1896/08/our-congress.htm>.
- Mak, B. K. L., Cheung, L. T. O., & Hui, D. L. H. (2017). Community participation in the decision-making process for sustainable tourism development in rural areas of Hong Kong, China. *Sustainability (Switzerland)*, 9(10). <https://doi.org/10.3390/su9101695>.
- Mazzucato, M. (2015). *Building the Entrepreneurial State: A New Framework for Envisioning and Evaluating a Mission-oriented Public Sector*. 1–25. <http://www.levyinstitute.orghttps://ssrn.com/abstract=2544707>.
- Mill, J. S. (1885). *Principles Of Political Economy*. GUTENBERG.
- Okello, M. M., & Novelli, M. (2014). Tourism in the East African Community (EAC): Challenges, opportunities, and ways forward. *Tourism and Hospitality Research*, 14(2), 53–66. <https://doi.org/10.1177/1467358414529580>.
- Schellhorn, M. (2010). Development for whom? Social justice and the business of ecotourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 18(1), 115–135. <https://doi.org/10.1080/09669580903367229>.
- Setiawan Chaniago, D., Nugroho, H., & Falikul Isbah, M. (2023). State Capitalism In The Tourism Sector: Mandalika Special Economic Zone Study. *Internatioan Journal Of Educational Research and Social Science*, 4(5), 828–839. <https://ijersc.org/>.
- Silviana, D., Arwani, M., & Himawati, I. P. (2021). Analisis Pengembangan Desa Wisata di Desa Sumber Urip, Rejang Lebong, Bengkulu. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 7(1), 41–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/jsa.7.1.41-53.2021>.
- Smith, A. (1998). *An Inquiry into the Nature and Causes of THE WEALTH OF NATIONS*. The Electric Book Company. [www.elecbook.com](http://www.elecbook.com).
- Snyman, S. (2014). Assessment of the main factors impacting community members' attitudes towards tourism and protected areas in six southern African countries : original research. *Sabinet: African Journal*, 56(2), 1–12.
- Sperber, N. (2019). The many lives of state capitalism: From classical Marxism to free-market advocacy. *History of the Human Sciences*, 32(3), 100–124. <https://doi.org/10.1177/0952695118815553>.

- Valentina, A., & Elsera, M. (2023). Analisis Ketahanan Sosial Masyarakat “Nusantara” Dalam Pembangunan Ibukota Negara. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 9(1), 39–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/jsa.9.1.37-50.2023>.
- Zebryte, I., & Jorquera, H. (2017). Chilean tourism sector “B Corporations”: evidence of social entrepreneurship and innovation. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research*, 23(6), 866–879. <https://doi.org/10.1108/IJEER-07-2017-0218>.